



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 14/PK.01-

BA/3306/2/2026 tentang Perubahan Tim dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 tanggal 26 Februari 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PURWOREJO TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBMKPU																
1.	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner	a. Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, dan Notulensi b. SK Tim Kerja		√											TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Purworejo	ZI tahun 2025													
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui laman	a. Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi, dan Notulensi rapat koordinasi penyusunan rencana aksi b. Dokumen SK rencana aksi ZI Tahun 2025 c. Sosialisasi melalui laman		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				KPU Purworejo													
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan	Rapat pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan, dan tindak lanjut										√		√	
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	a. Daftar hadir b. Banner Budaya Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II.	Penataan Tata Laksana																	
1.	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	a. Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; b. SOP tersedia di ruang pelayanan; c. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	a. Dokumen SOP b. Undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulensi Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Purworejo c. Foto ketersediaan SOP d. Undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulensi evaluasi SOP												√	√	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	<i>E-Office</i> Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Menerapkan presensi berbasis aplikasi	Rekap presensi zoho dan <i>finger print</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan	a. Laman KPU Kabupaten Purworejo, media sosial KPU Kabupaten Purworejo (youtube, facebook, instagram, twitter, dan tiktok) b. Laman JDIH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				KPU Kabupaten Purworejo media sosial JDIH KPU Kabupaten Purworejo (youtube, facebook, instagram, dan twitter) c. E-PPID berbasis laman d. Sipol, Silon, Sidalih, Srikandi, Silog, Siakba,													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sirekap, Sikadeka, Sidapil, Sipaw, Sikum,													
		Pemanfatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT											√	√	√
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi public telah sesuai dengan peraturan perundang-	a. KPU Kabupaten Purworejo menerapkan keterbukaan	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		undangan	informasi publik b. KPU Kabupaten Purworejo menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	oleh publik melalui PPID maupun secara daring melalui e-PPID. Piagam-piagam penghargaan													
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Purworejo	a. Undangan, daftar hadir, dokumentasi, notulensi dan rapat evaluasi PPID b. Laporan pelayanan dan pengelolaan informasi publik												√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM																	
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai				√									TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan dan Pengumuman CPNS						√							
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan	Evaluasi kinerja CPNS dan PPPK	Dokumen SKP CPNS dan PPPK							√			√			

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi															
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SPMT Rotasi internal dan SK						√							
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi	√												
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	a. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat b. Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai												√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	a. Usulan diklat/bimtek dari KPU Purworejo ke Bagian Diklat b. Mengikuti pelatihan melalui aplikasi Simpel	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat bimtek dari KPU Purworejo ke Bagian Diklat									√				

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja, pegawai, <i>assesment</i> pegawai	Persentase analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisa mutasi pegawai								√					
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat yang telah diikuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui <i>coaching</i> atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Usulan diklat/bimtek dari KPU Purworejo ke Bagian Diklat Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Laporan monitoring efektivitas kegiatan pendidikan dan pelatihan												√	
4.	Penetapan	Terdapat penetapan	Melakukan	PK Eselon III	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kinerja Individu	kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III Tahun 2025 dan SKP Eselon IV tahun 2025	tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025; SKP tahun 2025													
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III Tahun 2025 dan SKP Eselon IV tahun 2025	Hasil pengukuran kinerja	√												
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	SKP Pegawai				√			√			√			

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	Satyalancana; penetapan pegawai teladan							√						
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah sosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai					√								

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS																	
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo memberikan pengarahan dan menandatangani RKA-KL 2025	RKA-KL 2025	√												TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Unsur pimpinan KPU Kabupaten Purworejo terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LKJIP	Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPLJ, dan Dokumen LKJIP KPU Purworejo		√											
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja							√						
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun RKT dan Penetapan Kinerja	RKT dan Penetapan Kinerja KPU Purworejo	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun RKT dan Penetapan Kinerja	RKT dan Penetapan Kinerja KPU Purworejo	√												
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	√												
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LKJIP 2024	LKJIP KPU Purworejo tahun 2024 tepat waktu	√												
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LKJIP 2025	LKJIP KPU Purworejo tahun 2024	√												
		Terdapat upaya	Mengikuti Bimtek	Undangan,	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Penyusunan SAKIP	dokumentasi, dan notulensi BIMTEK Penyusunan SAKIP													
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti Bimtek Penyusunan SAKIP	Undangan, dokumentasi, dan notulensi BIMTEK Penyusunan SAKIP												√	
V. Penguatan Pengawasan																	
1.	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi b. Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan	a. Undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulensi sosialisasi Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sekretariat KPU Kabupaten Purworejo dan diunggah melalui website KPU Kabupaten Purworejo	Pengendalian Gratifikasi b. Spanduk, poster, infografis melalui laman KPU Kabupaten Purworejo													
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi	√												
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Purworejo	Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	√												
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyusun Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Berita Acara Rapat Pleno SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Membuat <i>Control Environment Evaluation</i> (CEE)	Laporan Semesteran SPIP		√											
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Menyediakan kotak saran b. Membuat media	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			sarana pengaduan masyarakat melalui laman Lapor KPU	Masyarakat dan Publikasi Media Sosial													
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang diterima	Laporan Pengaduan Masyarakat												√	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi												√	
		Telah menindaklanjuti	Menindaklanjuti rekomendasi hasil	Tabel tindaklanjut												√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	penanganan pengaduan masyarakat													
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Pembuatan WBS	Saluran Penyampaian WBS melalui laman												√	
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Penyusunan SOP WBS	Laporan hasil rapat WBS internal												√	
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Purworejo mengevaluasi pelaksanaan WBS	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan												√	
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi	Tabel rekapitulasi tindaklanjut												√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		telah ditindaklanjuti		penanganan WBS													
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benluran Kepentingan							√						
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU KPU Kabupaten Purworejo melakukan Identifikasi/	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat							√						

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Pemyataan Potensi Benturan Kepentingan jika terdapat potensi													
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pemyataan Potensi Benturan Kepentingan jika terdapat potensi							√						
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan												√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kabupaten Purworejo	kepentingan													
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan bentursn kepentingan												√	
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																	
1.	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik dan melengkapi SOP	SK KPU Kabupaten Purworejo tentang Penetapan SOP Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik									√				TIM PENGUATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Standar pelayanan telah	Menyusun maklumat	Maklumat pelayanan publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dimaklumkan	pelayanan publik dan mensosialisasikan melalui laman serta dipasang di papan pengumuman	sudah diunggah di laman dan dipasang di papan pengumuman													
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	Mengunggah SOP di laman KPU Kabupaten Purworejo	SOP tersedia di laman KPU Kabupaten Purworejo dan mudah diakses	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Mengkaji ulang dokumen SOP standar pelayanan	Laporan kegiatan kaji ulang dokumen SOP												√	
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui kegiatan apel pagi,	Dokumentasi apel pagi, daftar hadir, notulen rapat internal divisi Sosdiklih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prima	rapat internal divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, serta <i>staff meeting</i>	Parmas dan SDM serta <i>staff meeting</i>													
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Menyampaikan informasi tentang standar pelayanan di laman dan media sosial	Halaman laman dan media sosial KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan												√	
		Telah terdapat sarana layanan	Mengintegrasikan Pelayanan PPID dan	Tautan laman KPU dan e-PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		terpadu/ terintegrasi	Pengaduan Masyarakat melalui laman laman KPU dan e-PPID														
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat inovasi pelayanan melalui LAPOR KPU di laman dan pemanfaatan e-PPID	Halaman laman KPU dan e-PPID Kabupaten Purworejo							√	√	√	√	√	√	
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Melakukan survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Laporan Hasil survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)						√						√	
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara	Menayangkan IKM hasil survei SPAK dan SPKP di laman KPU Kabupaten	Tangkapan layar dari laman							√					√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		terbuka	Purworejo														
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei								√					

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi